



**PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 05 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 29 TAHUN 2010 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya penerimaan Dana Transfer Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011 yang belum ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 dan mengingat dana tersebut sangat mendesak untuk dimanfaatkan dalam rangka membiayai operasional belajar mengajar di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta atau Sederajat, maka dalam rangka kelancaran penatausahaan keuangan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari dana dimaksud, dianggap perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 29 tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa perubahan yang dilakukan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, adalah penambahan anggaran Pendapatan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, penambahan anggaran Belanja Tidak Langsung Belanja Hibah pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan anggaran Belanja Langsung pada Satuan Kerja Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tinda Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
19. Peraturan Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 211);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 29) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka yakni huruf C angka 1 sehingga Pasal 1 berbunyi :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 terdiri dari

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

3. Diantara Pasal 3 dan 4 disisipkan 1 (Satu) Pasal, yakni Pasal 3a sehingga berbunyi sebagai berikut :



Pasal 3a

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 akan disesuaikan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 dan/atau dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2011.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penetapan dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekretaris Daerah	
2. Asisten	
3. Ka. DPKD	
4.	
5.	

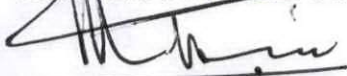
Ditetapkan di Masamba,
pada tanggal **28 Maret** 2011


BUPATI,

ARIFIN JUNAIDI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 2011

SEKRETARIS DAERAH



MUJAHIDIN IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2011 NOMOR 05

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
 RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN LUWU UTARA
 TAHUN ANGGARAN 2011

NOMOR URUT	URAIAN	ANGGARAN				
		ANGGARAN POKOK	ANGGARAN PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG		% ANGGARAN
				Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN	Rp 555.160.561.549,00	Rp 581.074.405.549,00	Rp 25.913.844.000,00	4,67%	100,00%
1. 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp 35.011.986.473,00	Rp 35.011.986.473,00	Rp -	0,00%	5,63%
1. 1 1	Hasil Pajak Daerah	Rp 4.251.588.346,00	Rp 4.251.588.346,00	Rp -	0,00%	0,67%
1. 1 2	Hasil Retribusi Daerah	Rp 24.534.717.500,00	Rp 24.534.717.500,00	Rp -	0,00%	3,45%
1. 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 865.784.952,00	Rp 865.784.952,00	Rp -	0,00%	0,32%
1. 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp 5.359.895.675,00	Rp 5.359.895.675,00	Rp -	0,00%	1,20%
1. 2	DANA PERIMBANGAN	Rp 469.983.374.476,00	Rp 469.983.374.476,00	Rp -	0,00%	88,32%
1 2 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp 36.407.884.476,00	Rp 36.407.884.476,00	Rp -	0,00%	7,42%
1 2 2	Dana Alokasi Umum	Rp 377.853.290.000,00	Rp 377.853.290.000,00	Rp -	0,00%	72,34%
1 2 3	Dana Alokasi Khusus	Rp 55.722.200.000,00	Rp 55.722.200.000,00	Rp -	0,00%	8,56%
1. 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Rp 50.165.200.600,00	Rp 76.079.044.600,00	Rp 25.913.844.000,00	51,66%	6,05%
1. 3 1	Pendapatan Hibah	Rp 1.511.650.000,00	Rp 27.425.494.000,00	Rp 25.913.844.000,00	1714,28%	0,33%
1. 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp 9.973.240.000,00	Rp 9.973.240.000,00	Rp -	0,00%	1,97%
1. 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp 25.913.843.200,00	Rp 25.913.843.200,00	Rp -	0,00%	1,33%
1. 3 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	Rp 12.065.967.400,00	Rp 12.065.967.400,00	Rp -	0,00%	2,25%
1. 3 6	Sumbangan Pihak Ketiga	Rp 700.500.000,00	Rp 700.500.000,00	Rp -	0,00%	0,18%
2	BELANJA	Rp 567.360.561.549,00	Rp 593.274.405.549,00	Rp 25.913.844.000,00	4,57%	100,00%
2 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp 313.046.323.269,00	Rp 313.132.180.269,00	Rp 85.857.000,00	0,03%	52,78%
2 1 1	Belanja Pegawai	Rp 279.411.721.800,00	Rp 279.411.721.800,00	Rp -	0,00%	47,10%
	- Belanja Pegawai Gaji PNS	Rp 218.725.173.000,00	Rp 218.725.173.000,00	Rp -	0,00%	36,87%
	- Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS	Rp 49.627.335.000,00	Rp 49.627.335.000,00	Rp -	0,00%	8,36%
	- Belanja Pegawai Lainnya	Rp 11.059.213.800,00	Rp 11.059.213.800,00	Rp -	0,00%	1,86%
2 1 3	Belanja Subsidi	Rp 22.500.000,00	Rp 22.500.000,00	Rp -	0,00%	6,13%
2 1 4	Belanja Hibah	Rp 4.070.000.000,00	Rp 4.155.857.000,00	Rp 85.857.000,00	2,11%	6,13%
2 1 5	Belanja Bantuan Sosial	Rp 3.072.573.692,00	Rp 3.072.573.692,00	Rp -	0,00%	0,65%
2 1 6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes	Rp 629.822.000,00	Rp 629.822.000,00	Rp -	0,00%	0,10%
2 1 7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes	Rp 25.173.860.922,00	Rp 25.173.860.922,00	Rp -	0,00%	4,10%
2 1 8	Belanja Tidak Terduga	Rp 665.844.855,00	Rp 665.844.855,00	Rp -	0,00%	0,13%
2 2	BELANJA LANGSUNG	Rp 254.314.238.280,00	Rp 280.142.225.280,00	Rp 25.827.987.000,00	10,16%	47,22%
2 2 1	Belanja Pegawai	Rp 9.166.812.400,00	Rp 14.332.409.800,00	Rp 5.165.597.400,00	56,35%	0,00%
2 2 2	Belanja Barang dan jasa	Rp 134.249.575.237,00	Rp 147.911.964.837,00	Rp 13.662.389.600,00	10,18%	0,00%
2 3	Belanja Modal	Rp 110.897.850.643,00	Rp 117.897.850.643,00	Rp 7.000.000.000,00	6,31%	0,00%
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp (12.200.000.000,00)	Rp (12.200.000.000,00)	Rp -	0,00%	100,00%
3	PEMBIAYAAN DAERAH	Rp 12.200.000.000,00	Rp 12.200.000.000,00	Rp -	0,00%	100,00%
3 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	Rp 29.146.031.362,00	Rp 29.146.031.362,00	Rp -	0,00%	82,30%
3 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp 28.846.031.362,00	Rp 28.846.031.362,00	Rp -	0,00%	81,27%
3 1 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp -	0,00%	1,03%
3 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	Rp 16.946.031.362,00	Rp 16.946.031.362,00	Rp -	0,00%	100,00%
3 2 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	#DIV/0!	38,48%
3 2 3	Pembayaran Pokok Utang	Rp -	Rp -	Rp -	#DIV/0!	0,00%
3 2 5	Pinjaman Dana Bergulir	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp -	0,00%	61,52%
3 2 6	Pembayaran Kegiatan Lanjutan	Rp 16.646.031.362,00	Rp 16.646.031.362,00	Rp -	0,00%	61,52%
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	Rp -	Rp -	Rp -		

BUPATI,


 ARIFIN JUNAIDI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekretaris Daerah	
2. Asisten	
3. Ka. DPKD	
4. <i>Kabid Anggaran</i>	<i>[Signature]</i>
5.	<i>[Signature]</i>

NO.	URAIAN	ANGGARAN POKOK	ANGGARAN PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
1.	PENDAPATAN DAERAH	Rp. 555.160.561.549,00	Rp. 581.074.405.549,00	Rp. 25.913.844.000,00
a.	Pendapatan Asli Daerah	Rp. 35.011.986.473,00	Rp. 35.011.986.473,00	Rp. -
1.	Pajak Daerah	Rp. 4.251.588.346,00	Rp. 4.251.588.346,00	Rp. -
2.	Retribusi Daerah	Rp. 24.534.717.500,00	Rp. 24.534.717.500,00	Rp. -
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	Rp. 865.784.952,00	Rp. 865.784.952,00	Rp. -
4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp. 5.359.895.675,00	Rp. 5.359.895.675,00	Rp. -
b.	Dana Perimbangan	Rp. 469.983.374.476,00	Rp. 469.983.374.476,00	Rp. -
1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp. 36.407.884.476,00	Rp. 36.407.884.476,00	Rp. -
2.	Dana Alokasi Umum	Rp. 377.853.290.000,00	Rp. 377.853.290.000,00	Rp. -
3.	Dana Alokasi Khusus	Rp. 55.722.200.000,00	Rp. 55.722.200.000,00	Rp. -
c.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp. 50.165.200.600,00	Rp. 76.079.044.600,00	Rp. 25.913.844.000,00
1.	H i b a h	Rp. 1.511.650.000,00	Rp. 27.425.494.000,00	Rp. 25.913.844.000,00
2.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp. 9.973.240.000,00	Rp. 9.973.240.000,00	Rp. -
3.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp. 25.913.843.200,00	Rp. 25.913.843.200,00	Rp. -
4.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	Rp. 12.065.967.400,00	Rp. 12.065.967.400,00	Rp. -
5.	Sumbangan Pihak Ketiga	Rp. 700.500.000,00	Rp. 700.500.000,00	Rp. -
2.	BELANJA DAERAH	Rp. 567.360.561.549,00	Rp. 593.274.405.549,00	Rp. 25.913.844.000,00
a.	Belanja Tidak Langsung	Rp. 313.046.323.269,00	Rp. 313.132.180.269,00	Rp. 85.857.000,00
1.	Belanja Pegawai	Rp. 279.411.721.800,00	Rp. 279.411.721.800,00	Rp. -
2.	Belanja Subsidi	Rp. 22.500.000,00	Rp. 22.500.000,00	Rp. -
3.	Belanja Hibah	Rp. 4.070.000.000,00	Rp. 4.155.857.000,00	Rp. 85.857.000,00
4.	Belanja Bantuan Sosial	Rp. 3.072.573.692,00	Rp. 3.072.573.692,00	Rp. -
5.	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	Rp. 629.822.000,00	Rp. 629.822.000,00	Rp. -
6.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp. 25.173.860.922,00	Rp. 25.173.860.922,00	Rp. -
7.	Belanja Tidak Terduga	Rp. 665.844.855,00	Rp. 665.844.855,00	Rp. -
b.	Belanja Langsung	Rp. 254.314.238.280,00	Rp. 280.142.225.280,00	Rp. 25.827.987.000,00
1.	Belanja Pegawai	Rp. 9.166.812.400,00	Rp. 14.332.409.800,00	Rp. 5.165.597.400,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 134.249.575.237,00	Rp. 147.911.964.837,00	Rp. 13.662.389.600,00
3.	Belanja Modal	Rp. 110.897.850.643,00	Rp. 117.897.850.643,00	Rp. 7.000.000.000,00
	Defisit.....	Rp. (12.200.000.000,00)	Rp. (12.200.000.000,00)	Rp. -
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	Rp. 12.200.000.000,00	Rp. 12.200.000.000,00	Rp. -
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 29.146.031.362,00	Rp. 29.146.031.362,00	Rp. -
1.	SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	Rp. 28.846.031.362,00	Rp. 28.846.031.362,00	
2.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Dana Bergulir	Rp. 300.000.000,00	Rp. 300.000.000,00	
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 16.946.031.362,00	Rp. 16.946.031.362,00	Rp. -
1.	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Rp. -	Rp. -	
2.	Pembayaran Pokok Utang	Rp. -	Rp. -	
3.	Dana Bergulir	Rp. 300.000.000,00	Rp. 300.000.000,00	
4.	Pembayaran Kegiatan Lanjutan	Rp. 16.646.031.362,00	Rp. 16.646.031.362,00	
	SILPA*) Anggaran Tahun Berkenan...	Rp. -	Rp. -	Rp. -

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN LUWU UTARA
 TAHUN ANGGARAN 2011

KODE REKENING	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	TAHUN ANGGARAN 2011				PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	BERTAMBAH / BERKURANG Rp.		
1. 01. 101.01.	DINAS PENDIDIKAN, OLAH RAGA & PEMUDA					
4.	PENDAPATAN	Rp	Rp	Rp		
6.	BELANJA	Rp 189.170.433.000,00	Rp 214.998.420.000,00	Rp 25.827.987.000,00		
00. 00. 5. 1.	Belanja Tak Langsung	Rp 140.983.678.000,00	Rp 140.983.678.000,00	Rp		
00. 00. 5. 1. 1.	Belanja Pegawai	Rp 140.983.678.000,00	Rp 140.983.678.000,00	Rp		
00. 00. 5. 1. 1. 01.	Gaji & Tunjangan	Rp 119.248.123.000,00	Rp 119.248.123.000,00	Rp		
00. 00. 5. 1. 1. 02.	Tambahan Penghasilan PNS	Rp 21.735.555.000,00	Rp 21.735.555.000,00	Rp		
xx. xx. 5. 2.	Program Lainnya	Rp 48.166.755.000,00	Rp 74.014.742.000,00	Rp 25.827.987.000,00		
16. 63. 5. 2.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Sembilan Tahun	Rp 36.918.790.400,00	Rp 61.746.777.400,00	Rp 25.827.987.000,00		Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011
5. 2. 1. 02.	Belanja Honorarium Non PNS	Rp	Rp 5.165.597.400,00	Rp 5.165.597.400,00		
5. 2. 1. 02. 02.	Honorarium Pegawai Honorif/Tidak Tetap	Rp	Rp 5.165.597.400,00	Rp 5.165.597.400,00		
5. 2. 2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp	Rp 13.682.389.600,00	Rp 13.682.389.600,00		
5. 2. 2. 01.	Belanja Bahan Pakai/Kebijakan Kantor	Rp	Rp 7.872.389.600,00	Rp 7.872.389.600,00		
5. 2. 2. 01. 01.	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp	Rp 7.822.389.800,00	Rp 7.822.389.800,00		
5. 2. 2. 01. 04.	Belanja Material/Benda Pos Lainnya	Rp	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00		
5. 2. 2. 02.	Belanja Bahan Material	Rp	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00		
5. 2. 2. 02. 06.	Belanja Bahan Material Lainnya	Rp	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00		
5. 2. 2. 03.	Belanja Jasa Kantor	Rp	Rp 40.000.000,00	Rp 40.000.000,00		
5. 2. 2. 03. 03.	Belanja Listrik	Rp	Rp 20.000.000,00	Rp 20.000.000,00		
5. 2. 2. 03. 05.	Belanja Surat/Korrespondensi	Rp	Rp 20.000.000,00	Rp 20.000.000,00		
5. 2. 2. 06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	Rp	Rp 3.500.000.000,00	Rp 3.500.000.000,00		
5. 2. 2. 06. 01.	Belanja Cetak	Rp	Rp 1.000.000.000,00	Rp 1.000.000.000,00		
5. 2. 2. 06. 02.	Belanja Penggandaan	Rp	Rp 2.500.000.000,00	Rp 2.500.000.000,00		
5. 2. 2. 08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	Rp	Rp 250.000.000,00	Rp 250.000.000,00		

KODE REKENING	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	TAHUN ANGGARAN 2011			BERTAMBAH / BERKURANG Rp.	PENJELASAN
		3 SEBELUM	4 SETELAH	5 BERTAMBAH / BERKURANG Rp.		
1	2	3	4	5	6	
5. 2. 2. 08. 01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	Rp -	Rp 250.000.000,00	Rp 250.000.000,00	-	
5. 2. 2. 11.	Belanja Makan dan Minum	Rp -	Rp 1.200.000.000,00	Rp 1.200.000.000,00	-	
5. 2. 2. 11. 01.	Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai	Rp -	Rp 800.000.000,00	Rp 800.000.000,00	-	
5. 2. 2. 11. 02.	Belanja Makan dan Minum Pejabat	Rp -	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	-	
5. 2. 2. 14.	Belanja Makan dan Minum	Rp -	Rp 200.000.000,00	Rp 200.000.000,00	-	
5. 2. 2. 14. 01.	Belanja Pakelan Olahraga	Rp -	Rp 200.000.000,00	Rp 200.000.000,00	-	
5. 2. 2. 15.	Belanja Perjalanan Dinas	Rp -	Rp 500.000.000,00	Rp 500.000.000,00	-	
5. 2. 2. 15. 01.	Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah	Rp -	Rp 350.000.000,00	Rp 350.000.000,00	-	
5. 2. 2. 15. 02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp -	Rp 150.000.000,00	Rp 150.000.000,00	-	
5. 2. 3.	Belanja Modal	Rp -	Rp 7.000.000.000,00	Rp 7.000.000.000,00	-	
5. 2. 3. 27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Pustaka	Rp -	Rp 7.000.000.000,00	Rp 7.000.000.000,00	-	
5. 2. 3. 27. 26.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Perustakaan	Rp -	Rp 7.000.000.000,00	Rp 7.000.000.000,00	-	
5. 2. 19. ...	Kegiatan Lainnya	Rp 35.918.790.400,00	Rp 35.918.790.400,00	Rp -	-	
1. 02. 1.02.01.	DINAS KESEHATAN	Rp (189.170.433.000,00)	Rp (214.998.430.000,00)	Rp (25.827.997.000,00)	-	
4.	PENDAPATAN	Rp 1.500.000.000,00	Rp 1.500.000.000,00	Rp -	-	
5.	BELANJA	Rp 40.403.021.994,00	Rp 40.403.021.994,00	Rp -	-	
00. 00. 5. 1.	Belanja Tidak Langsung	Rp 24.177.265.000,00	Rp 24.177.265.000,00	Rp -	-	
00. 00. 5. 1. 1.	Belanja Pegawai	Rp 24.177.265.000,00	Rp 24.177.265.000,00	Rp -	-	
00. 00. 5. 1. 1. 01.	Gaji & Tunjangan	Rp 18.937.865.000,00	Rp 18.937.865.000,00	Rp -	-	
00. 00. 5. 1. 1. 02.	Tambahan Penghasilan PNS	Rp 5.174.400.000,00	Rp 5.174.400.000,00	Rp -	-	
00. 00. 5. 1. 1. 05.	Biaya Insentif Peningkatan Retribusi Daerah	Rp 65.000.000,00	Rp 65.000.000,00	Rp -	-	
00. 00. 5. 2.	Belanja Langsung	Rp 16.225.756.994,00	Rp 16.225.756.994,00	Rp -	-	
00. 00. 5. 2. 1.	SURPLUS / DEFSIT	Rp (39.103.021.994,00)	Rp (39.103.021.994,00)	Rp -	-	
1. 02. 1.02.02.	RUMAH SAKIT LUMUH ANDI DJENMA HASANBA					
4.	PENDAPATAN	Rp 19.976.150.000,00	Rp 19.976.150.000,00	Rp -	-	
5.	BELANJA	Rp 43.066.813.000,00	Rp 43.066.813.000,00	Rp -	-	
00. 00. 5. 1.	Belanja Tidak Langsung	Rp 14.093.548.000,00	Rp 14.093.548.000,00	Rp -	-	
00. 00. 5. 1. 1.	Belanja Pegawai	Rp 14.093.548.000,00	Rp 14.093.548.000,00	Rp -	-	
00. 00. 5. 1. 1. 01.	Gaji & Tunjangan	Rp 10.227.523.000,00	Rp 10.227.523.000,00	Rp -	-	
00. 00. 5. 1. 1. 02.	Tambahan Penghasilan PNS	Rp 3.431.800.000,00	Rp 3.431.800.000,00	Rp -	-	
00. 00. 5. 1. 1. 05.	Biaya Insentif Peningkatan Retribusi Daerah	Rp 424.225.000,00	Rp 424.225.000,00	Rp -	-	
00. 00. 5. 2.	Belanja Langsung	Rp 28.983.265.000,00	Rp 28.983.265.000,00	Rp -	-	
00. 00. 5. 2. 1.	SURPLUS / DEFSIT	Rp (23.090.663.000,00)	Rp (23.090.663.000,00)	Rp -	-	
1. 03. 1.03.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM					
4.	PENDAPATAN	Rp 928.883.683,00	Rp 928.883.683,00	Rp -	-	
5.	BELANJA	Rp 69.959.008.286,00	Rp 69.959.008.286,00	Rp -	-	
00. 00. 5. 1.	Belanja Tidak Langsung	Rp 5.178.640.000,00	Rp 5.178.640.000,00	Rp -	-	

KODE REKENING	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	TAHUN ANGGARAN 2011			BERTAMBAH/ BERKURANG Rp.	PENJELASAN
		3 SEBELUM	4 SETELAH	5		
1						
00.00.5.1.1.01	Gaji & Tunjangan	Rp 1.491.693.000,00	Rp 1.491.693.000,00	Rp -		
00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	Rp 517.200.000,00	Rp 517.200.000,00	Rp -		
00.00.5.1.1.05	Biaya Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	Rp 20.302.000,00	Rp 20.302.000,00	Rp -		
xx.xx.5.2	Belanja Langsung	Rp 2.088.830.000,00	Rp 2.088.830.000,00	Rp -		
	SURPLUS / DEFISIT	Rp (2.709.895.000,00)	Rp (2.709.895.000,00)	Rp -		
1.11.1.11.01	SADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
4	PENDAPATAN	Rp -	Rp -	Rp -		
6	BELANJA	Rp 2.716.633.000,00	Rp 2.716.633.000,00	Rp -		
00.00.5.1	Belanja Tidak Langsung	Rp 3.464.471.000,00	Rp 3.464.471.000,00	Rp -		
00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	Rp 3.484.471.000,00	Rp 3.484.471.000,00	Rp -		
00.00.5.1.1.01	Gaji & Tunjangan	Rp 2.870.071.000,00	Rp 2.870.071.000,00	Rp -		
00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	Rp 794.400.000,00	Rp 794.400.000,00	Rp -		
xx.xx.5.2	Belanja Langsung	Rp 2.262.162.000,00	Rp 2.262.162.000,00	Rp -		
	SURPLUS / DEFISIT	Rp (2.716.633.000,00)	Rp (2.716.633.000,00)	Rp -		
1.13.1.13.01	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI					
4	PENDAPATAN	Rp -	Rp -	Rp -		
6	BELANJA	Rp 6.336.526.000,00	Rp 6.336.526.000,00	Rp -		
00.00.5.1	Belanja Tidak Langsung	Rp 3.531.255.000,00	Rp 3.531.255.000,00	Rp -		
00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	Rp 3.531.255.000,00	Rp 3.531.255.000,00	Rp -		
00.00.5.1.1.01	Gaji & Tunjangan	Rp 2.857.055.000,00	Rp 2.857.055.000,00	Rp -		
00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	Rp 674.200.000,00	Rp 674.200.000,00	Rp -		
xx.xx.5.2	Belanja Langsung	Rp 2.805.270.000,00	Rp 2.805.270.000,00	Rp -		
	SURPLUS / DEFISIT	Rp (6.336.526.000,00)	Rp (6.336.526.000,00)	Rp -		
1.14.1.14.01	KANTOR LAYANAN KERJA					
4	PENDAPATAN	Rp 12.000.000,00	Rp 12.000.000,00	Rp -		
6	BELANJA	Rp 2.441.490.000,00	Rp 2.441.490.000,00	Rp -		
00.00.5.1	Belanja Tidak Langsung	Rp 1.026.590.000,00	Rp 1.026.590.000,00	Rp -		
00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	Rp 1.026.590.000,00	Rp 1.026.590.000,00	Rp -		
00.00.5.1.1.01	Gaji & Tunjangan	Rp 871.190.000,00	Rp 871.190.000,00	Rp -		
00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	Rp 154.600.000,00	Rp 154.600.000,00	Rp -		
00.00.5.1.1.05	Biaya Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	Rp 600.000,00	Rp 600.000,00	Rp -		
xx.xx.5.2	Belanja Langsung	Rp 1.414.900.000,00	Rp 1.414.900.000,00	Rp -		
	SURPLUS / DEFISIT	Rp (2.429.490.000,00)	Rp (2.429.490.000,00)	Rp -		
1.15.1.15.01	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERAGANGAN					
4	PENDAPATAN	Rp -	Rp -	Rp -		
6	BELANJA	Rp 3.976.030.000,00	Rp 3.976.030.000,00	Rp -		
00.00.5.1	Belanja Tidak Langsung	Rp 2.235.335.000,00	Rp 2.235.335.000,00	Rp -		
00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	Rp 2.235.335.000,00	Rp 2.235.335.000,00	Rp -		

KODE REKENING	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	TAHUN ANGGARAN 2011			BERTAMBAH / BERKURANG Rp.	PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH			
1	2	3	4	5	6	
00 00 5 1 1 01	Gaji & Tunjangan	Rp 1.787.535.000,00	Rp 1.787.535.000,00	Rp -	-	
00 00 5 1 1 02	Tambahan Penghasilan PNS	Rp 487.800.000,00	Rp 487.800.000,00	Rp -	-	
xx xx 5 2	Belanja Langsung	Rp 1.738.895.000,00	Rp 1.738.895.000,00	Rp -	-	
	SURPLUS/(DEFISIT)	Rp (2.976.030.000,00)	Rp (2.976.030.000,00)	Rp -	-	
1. 19. 119.01.	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERUMPOUNGAN MASYARAKAT					
4	PENDAPATAN	Rp -	Rp -	Rp -	-	
5	BELANJA	Rp 2.818.381.000,00	Rp 2.818.381.000,00	Rp -	-	
00 00 5 1	Belanja Tidak Langsung	Rp 1.477.811.000,00	Rp 1.477.811.000,00	Rp -	-	
00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	Rp 1.477.811.000,00	Rp 1.477.811.000,00	Rp -	-	
00 00 5 1 1 01	Gaji & Tunjangan	Rp 1.148.811.000,00	Rp 1.148.811.000,00	Rp -	-	
00 00 5 1 1 02	Tambahan Penghasilan PNS	Rp 328.800.000,00	Rp 328.800.000,00	Rp -	-	
xx xx 5 2	Belanja Langsung	Rp 1.400.750.000,00	Rp 1.400.750.000,00	Rp -	-	
	SURPLUS/(DEFISIT)	Rp (2.618.381.000,00)	Rp (2.618.381.000,00)	Rp -	-	
1. 20. 120.01.	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPS DPRD)					
4	PENDAPATAN	Rp -	Rp -	Rp -	-	
5	BELANJA	Rp 5.054.558.800,00	Rp 5.054.558.800,00	Rp -	-	
00 00 5 1	Belanja Tidak Langsung	Rp 5.054.558.800,00	Rp 5.054.558.800,00	Rp -	-	
00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	Rp 5.054.558.800,00	Rp 5.054.558.800,00	Rp -	-	
00 00 5 1 1 01	Gaji & Tunjangan	Rp 3.290.596.800,00	Rp 3.290.596.800,00	Rp -	-	
00 00 5 1 1 03	Belanja Penerimaan Lainnya Pimlidan & Anggota DPRD serta KDH/WKDH	Rp 1.764.000.000,00	Rp 1.764.000.000,00	Rp -	-	
xx xx 5 2	Belanja Langsung	Rp -	Rp -	Rp -	-	
	SURPLUS/(DEFISIT)	Rp (5.054.558.800,00)	Rp (5.054.558.800,00)	Rp -	-	
1. 20. 120.02	KEPALA DAERAH & WAKIL KEPALA DAERAH					
4	PENDAPATAN	Rp -	Rp -	Rp -	-	
5	BELANJA	Rp 488.400.000,00	Rp 488.400.000,00	Rp -	-	
00 00 5 1	Belanja Tidak Langsung	Rp 488.400.000,00	Rp 488.400.000,00	Rp -	-	
00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	Rp 488.400.000,00	Rp 488.400.000,00	Rp -	-	
00 00 5 1 1 01	Gaji & Tunjangan	Rp 188.400.000,00	Rp 188.400.000,00	Rp -	-	
00 00 5 1 1 03	Belanja Penerimaan Lainnya Pimlidan & Anggota DPRD serta KDH/WKDH	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp -	-	
xx xx 5 2	Belanja Langsung	Rp -	Rp -	Rp -	-	
	SURPLUS/(DEFISIT)	Rp (488.400.000,00)	Rp (488.400.000,00)	Rp -	-	
1. 20. 120.03	SEKRETARIAT DAERAH					
4	PENDAPATAN	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp -	-	
5	BELANJA	Rp 24.144.008.000,00	Rp 24.144.008.000,00	Rp -	-	
00 00 5 1	Belanja Tidak Langsung	Rp 8.501.950.000,00	Rp 8.501.950.000,00	Rp -	-	
00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	Rp 8.501.950.000,00	Rp 8.501.950.000,00	Rp -	-	
00 00 5 1 1 01	Gaji & Tunjangan	Rp 6.890.350.000,00	Rp 6.890.350.000,00	Rp -	-	

KODE REKENING	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	TAHUN ANGGARAN 2011				PENJELASAN
		3	4	6		
		SEBELUM	SETELAH	BERTAMBAH / BERKURANG	Rp.	
1						
00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PMS	Rp 1.811.800.000,00	Rp 1.811.800.000,00	Rp -		
xx.xx.6.2	Belanja Langsung	Rp 15.842.056.000,00	Rp 15.842.056.000,00	Rp -		
	SURPLUS/(DEFISIT)	Rp (23.844.005.000,00)	Rp (23.844.005.000,00)	Rp -		
1.20.1.20.04	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH					
4	PENDAPATAN	Rp -	Rp -	Rp -		
6	BELANJA	Rp 13.387.238.000,00	Rp 13.387.238.000,00	Rp -		
00.00.6.1	Belanja Tidak Langsung	Rp 2.311.376.000,00	Rp 2.311.376.000,00	Rp -		
00.00.6.1.1	Belanja Pegawai	Rp 2.311.376.000,00	Rp 2.311.376.000,00	Rp -		
00.00.5.1.1.01	Gaji & Tunjangan	Rp 1.963.378.000,00	Rp 1.963.378.000,00	Rp -		
00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PMS	Rp 348.000.000,00	Rp 348.000.000,00	Rp -		
xx.xx.6.2	Belanja Langsung	Rp 11.075.860.000,00	Rp 11.075.860.000,00	Rp -		
	SURPLUS/(DEFISIT)	Rp (13.387.238.000,00)	Rp (13.387.238.000,00)	Rp -		
1.20.1.20.05	INSPEKTORAT KABUPATEN					
4	PENDAPATAN	Rp -	Rp -	Rp -		
6	BELANJA	Rp 4.223.878.000,00	Rp 4.223.878.000,00	Rp -		
00.00.6.1	Belanja Tidak Langsung	Rp 1.885.528.000,00	Rp 1.885.528.000,00	Rp -		
00.00.6.1.1	Belanja Pegawai	Rp 1.966.628.000,00	Rp 1.966.628.000,00	Rp -		
00.00.5.1.1.01	Gaji & Tunjangan	Rp 1.502.728.000,00	Rp 1.502.728.000,00	Rp -		
00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PMS	Rp 462.800.000,00	Rp 462.800.000,00	Rp -		
xx.xx.6.2	Belanja Langsung	Rp 2.288.350.000,00	Rp 2.288.350.000,00	Rp -		
	SURPLUS/(DEFISIT)	Rp (4.223.878.000,00)	Rp (4.223.878.000,00)	Rp -		
1.20.1.20.06	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
4	PENDAPATAN	Rp 630.186.760.386,00	Rp 630.099.604.386,00	Rp 26.913.844.000,00		
00.00.4.1	Pendapatan Asli Daerah	Rp 10.037.885.290,00	Rp 10.037.885.290,00	Rp -		
00.00.4.2	Dana Perimbangan	Rp 469.983.374.876,00	Rp 469.983.374.876,00	Rp -		
00.00.4.3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Rp 50.165.200.890,00	Rp 78.079.044.800,00	Rp 26.913.844.000,00		
00.00.4.3.1	Pendapatan Hibah	Rp 1.611.680.000,00	Rp 27.426.494.000,00	Rp 26.913.844.000,00		
00.00.4.3.1.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	Rp -	Rp 25.913.844.000,00	Rp 25.913.844.000,00		
00.00.4.3.1.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - Dana Transfer Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011	Rp -	Rp 26.913.844.000,00	Rp 26.913.844.000,00		Diterima diterima berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/MK/07/2010 tentang Podomom Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011
00.00.4.3.1.02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	Rp 1.611.680.000,00	Rp 1.611.680.000,00	Rp -		
00.00.4.3.1.03	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	Rp 12.000.000,00	Rp 12.000.000,00	Rp -		
00.00.4.3.1.04	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat Perorangan	Rp 489.650.000,00	Rp 489.650.000,00	Rp -		
00.00.4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	Rp 9.373.240.000,00	Rp 9.373.240.000,00	Rp -		
00.00.4.3.4	Dana Penyesuaian Otonomi Khusus	Rp 26.913.844.200,00	Rp 26.913.844.200,00	Rp -		

KODE REKENING	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	TAHUN ANGGARAN 2011				BERTAMBAH / BERKURANG Rp.	PENJELASAN
		3 SEBELUM	4 SETELAH	5			
1	2	3	4	5		6	8
00.00.4.3.6.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	Rp 12.085.987.400,00	Rp 12.085.987.400,00	Rp	Rp	-	
00.00.4.3.8.	Sumbangan Pihak Ketiga (SPK)	Rp 700.500.000,00	Rp 700.500.000,00	Rp	Rp	-	
00.00.5.1.	BELANJA	Rp 68.975.382.589,00	Rp 67.981.318.489,00	Rp	Rp	994.064,00	
00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	Rp 49.398.412.489,00	Rp 49.482.268.489,00	Rp	Rp	84.857.000,00	
00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	Rp 15.784.811.000,00	Rp 15.784.811.000,00	Rp	Rp	-	
00.00.5.1.1.01	Gaji & Tunjangan	Rp 10.835.972.000,00	Rp 10.835.972.000,00	Rp	Rp	-	
00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	Rp 3.331.900.000,00	Rp 3.331.900.000,00	Rp	Rp	-	
00.00.5.1.1.04	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	Rp 1.480.000.000,00	Rp 1.480.000.000,00	Rp	Rp	-	
00.00.5.1.1.05	Biaya Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	Rp 3.839.000,00	Rp 3.839.000,00	Rp	Rp	-	
00.00.5.1.3.	Belanja Subsidi	Rp 22.500.000,00	Rp 22.500.000,00	Rp	Rp	-	
00.00.5.1.4.	Belanja Hibah	Rp 4.070.000.000,00	Rp 4.158.857.000,00	Rp	Rp	88.857.000,00	Hibah Kepada Sekolah/Pesantren Swasta yang Bersumber dari Dana BOS Kab. Liris Usine TA.2011.
5.1.4.05.01	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi/Swasta	Rp 4.070.000.000,00	Rp 4.158.857.000,00	Rp	Rp	88.857.000,00	
5.1.4.05.01	Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	Rp 4.070.000.000,00	Rp 4.070.000.000,00	Rp	Rp	-	
5.1.4.05.03	Belanja Hibah Dana BOS kepada Sekolah Swasta	Rp -	Rp 88.857.000,00	Rp	Rp	88.857.000,00	Bertambah
00.00.5.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	Rp 3.072.573.692,00	Rp 3.072.573.692,00	Rp	Rp	-	
00.00.5.1.6.	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	Rp 629.822.000,00	Rp 629.822.000,00	Rp	Rp	-	
00.00.5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan pemerintahan Desa	Rp 25.173.860.922,00	Rp 25.173.860.922,00	Rp	Rp	-	Anggaran tidak mengalami perubahan
00.00.5.1.8.	Belanja Tak Tertunda	Rp 685.844.855,00	Rp 685.844.855,00	Rp	Rp	-	
xx.xx.5.2.	Belanja Langsung	Rp 17.578.950.000,00	Rp 17.578.950.000,00	Rp	Rp	-	
1.20.1.20.06.6.	PEMBIAYAAN	Rp 453.210.387.887,00	Rp 489.038.394.897,00	Rp	Rp	26.827.987.000,00	
1.20.1.20.06.6.1.	Penerimaan Pembayaran Daerah	Rp 29.148.031.382,00	Rp 29.148.031.382,00	Rp	Rp	-	
1.20.1.20.06.6.2.	Pengeluaran Pembayaran Daerah	Rp 16.546.031.382,00	Rp 16.546.031.382,00	Rp	Rp	-	
1.20.1.20.07.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT						
4.	PENDAPATAN	Rp -	Rp -	Rp	Rp	-	
5.	BELANJA	Rp 5.205.222.000,00	Rp 5.205.222.000,00	Rp	Rp	-	
00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	Rp 2.097.772.000,00	Rp 2.097.772.000,00	Rp	Rp	-	
00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	Rp 2.087.772.000,00	Rp 2.087.772.000,00	Rp	Rp	-	
00.00.5.1.1.01	Gaji & Tunjangan	Rp 1.653.372.000,00	Rp 1.653.372.000,00	Rp	Rp	-	
00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	Rp 434.400.000,00	Rp 434.400.000,00	Rp	Rp	-	
xx.xx.5.2.	Belanja Langsung	Rp 3.107.450.000,00	Rp 3.107.450.000,00	Rp	Rp	-	
1.20.1.20.08.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Rp (5.205.222.000,00)	Rp (5.205.222.000,00)	Rp	Rp	-	
4.	PENDAPATAN	Rp -	Rp -	Rp	Rp	-	
5.	BELANJA	Rp 3.854.830.000,00	Rp 3.854.830.000,00	Rp	Rp	-	
00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	Rp 2.285.580.000,00	Rp 2.285.580.000,00	Rp	Rp	-	
00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	Rp 2.285.580.000,00	Rp 2.285.580.000,00	Rp	Rp	-	

KODE REKENING	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	TAHUN ANGGARAN 2011			BERTAMBAH / BERKURANG Rp.	PENJELASAN
		3 SEBELUM	4 SETELAH	5		
1	2					8
00.00.5.1.1.01.	Gaji & Tunjangan	Rp 1.825.590.000,00	Rp 1.825.590.000,00	Rp -	-	
00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	Rp 360.000.000,00	Rp 360.000.000,00	Rp -	-	
xx.xx.6.2.	Belanja Langsung	Rp 4.680.050.000,00	Rp 4.680.050.000,00	Rp -	-	
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp (2.954.630.000,00)	Rp (2.954.630.000,00)	Rp -	-	
1.20.1.20.09.	PEMERINTAH KECAMATAN SABBAANG					
4.	PENDAPATAN	Rp 101.435.000,00	Rp 101.435.000,00	Rp -	-	
6.	BELANJA	Rp 1.784.710.000,00	Rp 1.784.710.000,00	Rp -	-	
00.00.6.1.1.	Belanja Tidak Langsung	Rp 1.463.050.000,00	Rp 1.463.050.000,00	Rp -	-	
00.00.6.1.1.01.	Belanja Pegawai	Rp 1.483.050.000,00	Rp 1.483.050.000,00	Rp -	-	
00.00.5.1.1.01.	Gaji & Tunjangan	Rp 1.235.678.000,00	Rp 1.235.678.000,00	Rp -	-	
00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	Rp 223.200.000,00	Rp 223.200.000,00	Rp -	-	
00.00.5.1.1.05.	Biaya Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	Rp 5.072.000,00	Rp 5.072.000,00	Rp -	-	
xx.xx.6.2.	Belanja Langsung	Rp 390.760.000,00	Rp 390.760.000,00	Rp -	-	
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp (1.663.275.000,00)	Rp (1.663.275.000,00)	Rp -	-	
1.20.1.20.10.	PEMERINTAH KECAMATAN BAEBUNTA					
4.	PENDAPATAN	Rp 7.614.500,00	Rp 7.614.500,00	Rp -	-	
6.	BELANJA	Rp 1.643.599.000,00	Rp 1.643.599.000,00	Rp -	-	
00.00.6.1.1.	Belanja Tidak Langsung	Rp 1.590.459.000,00	Rp 1.590.459.000,00	Rp -	-	
00.00.6.1.1.01.	Belanja Pegawai	Rp 1.690.459.000,00	Rp 1.690.459.000,00	Rp -	-	
00.00.5.1.1.01.	Gaji & Tunjangan	Rp 1.369.283.000,00	Rp 1.369.283.000,00	Rp -	-	
00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	Rp 220.800.000,00	Rp 220.800.000,00	Rp -	-	
00.00.5.1.1.05.	Biaya Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	Rp 376.000,00	Rp 376.000,00	Rp -	-	
xx.xx.6.2.	Belanja Langsung	Rp 253.140.000,00	Rp 253.140.000,00	Rp -	-	
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp (1.836.084.500,00)	Rp (1.836.084.500,00)	Rp -	-	
1.20.1.20.11.	PEMERINTAH KECAMATAN LIMBONG					
4.	PENDAPATAN	Rp 1.360.000,00	Rp 1.360.000,00	Rp -	-	
6.	BELANJA	Rp 948.010.000,00	Rp 948.010.000,00	Rp -	-	
00.00.6.1.1.	Belanja Tidak Langsung	Rp 744.870.000,00	Rp 744.870.000,00	Rp -	-	
00.00.6.1.1.01.	Belanja Pegawai	Rp 744.870.000,00	Rp 744.870.000,00	Rp -	-	
00.00.5.1.1.01.	Gaji & Tunjangan	Rp 530.002.000,00	Rp 530.002.000,00	Rp -	-	
00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	Rp 214.800.000,00	Rp 214.800.000,00	Rp -	-	
00.00.5.1.1.05.	Biaya Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	Rp 68.000,00	Rp 68.000,00	Rp -	-	
xx.xx.6.2.	Belanja Langsung	Rp 203.140.000,00	Rp 203.140.000,00	Rp -	-	
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp (946.650.000,00)	Rp (946.650.000,00)	Rp -	-	
1.20.1.20.12.	PEMERINTAH KECAMATAN SEKO					
4.	PENDAPATAN	Rp 1.720.000,00	Rp 1.720.000,00	Rp -	-	
6.	BELANJA	Rp 1.107.712.000,00	Rp 1.107.712.000,00	Rp -	-	
00.00.6.1.1.	Belanja Tidak Langsung	Rp 857.712.000,00	Rp 857.712.000,00	Rp -	-	
00.00.6.1.1.01.	Belanja Pegawai	Rp 867.712.000,00	Rp 867.712.000,00	Rp -	-	
00.00.5.1.1.01.	Gaji & Tunjangan	Rp 598.826.000,00	Rp 598.826.000,00	Rp -	-	

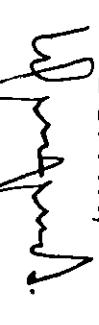
KODE REKENING	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	TAHUN ANGGARAN 2011			BERTAMBAH / BERKURANG Rp.	PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH			
1						
00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	Rp 268.800.000,00	Rp 268.800.000,00	Rp -		
00.00.5.1.1.05	Biaya Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	Rp 88.000,00	Rp 88.000,00	Rp -		
xx.xx.6.2	Belanja Langsung	Rp 250.000.000,00	Rp 250.000.000,00	Rp -		
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp (1.105.992.000,00)	Rp (1.105.992.000,00)	Rp -		
1.20.1.20.13.	PEMERINTAH KECAMATAN RAMPI					
4.	PENDAPATAN	Rp 600.000,00	Rp 600.000,00	Rp -		
6.	BELANJA	Rp 770.742.000,00	Rp 770.742.000,00	Rp -		
	Belanja Tidak Langsung	Rp 557.982.000,00	Rp 557.982.000,00	Rp -		
00.00.6.1.1.	Belanja Pegawai	Rp 657.862.000,00	Rp 657.862.000,00	Rp -		
00.00.5.1.1.01.	Gaji & Tunjangan	Rp 325.157.000,00	Rp 325.157.000,00	Rp -		
00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	Rp 232.800.000,00	Rp 232.800.000,00	Rp -		
00.00.5.1.1.05.	Biaya Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	Rp 25.000,00	Rp 25.000,00	Rp -		
xx.xx.6.2	Belanja Langsung	Rp 212.760.000,00	Rp 212.760.000,00	Rp -		
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp (770.242.000,00)	Rp (770.242.000,00)	Rp -		
1.20.1.20.14.	PEMERINTAH KECAMATAN MALANGKE					
4.	PENDAPATAN	Rp 7.800.000,00	Rp 7.800.000,00	Rp -		
6.	BELANJA	Rp 1.307.658.000,00	Rp 1.307.658.000,00	Rp -		
	Belanja Tidak Langsung	Rp 1.028.085.000,00	Rp 1.028.085.000,00	Rp -		
00.00.6.1.1.	Belanja Pegawai	Rp 1.028.085.000,00	Rp 1.028.085.000,00	Rp -		
00.00.5.1.1.01.	Gaji & Tunjangan	Rp 816.895.000,00	Rp 816.895.000,00	Rp -		
00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	Rp 208.800.000,00	Rp 208.800.000,00	Rp -		
00.00.5.1.1.05.	Biaya Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	Rp 390.000,00	Rp 390.000,00	Rp -		
xx.xx.6.2	Belanja Langsung	Rp 281.570.000,00	Rp 281.570.000,00	Rp -		
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp (1.299.655.000,00)	Rp (1.299.655.000,00)	Rp -		
1.20.1.20.15.	PEMERINTAH KECAMATAN MALANGKE BARAT					
4.	PENDAPATAN	Rp 8.868.000,00	Rp 8.868.000,00	Rp -		
6.	BELANJA	Rp 1.157.817.000,00	Rp 1.157.817.000,00	Rp -		
	Belanja Tidak Langsung	Rp 894.677.000,00	Rp 894.677.000,00	Rp -		
00.00.6.1.1.	Belanja Pegawai	Rp 894.677.000,00	Rp 894.677.000,00	Rp -		
00.00.5.1.1.01.	Gaji & Tunjangan	Rp 730.983.000,00	Rp 730.983.000,00	Rp -		
00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	Rp 163.200.000,00	Rp 163.200.000,00	Rp -		
00.00.5.1.1.05.	Biaya Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	Rp 494.000,00	Rp 494.000,00	Rp -		
xx.xx.6.2	Belanja Langsung	Rp 263.140.000,00	Rp 263.140.000,00	Rp -		
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp (1.147.948.000,00)	Rp (1.147.948.000,00)	Rp -		
1.20.1.20.16.	PEMERINTAH KECAMATAN MASAMBA					
4.	PENDAPATAN	Rp 164.740.000,00	Rp 164.740.000,00	Rp -		
6.	BELANJA	Rp 2.846.813.000,00	Rp 2.846.813.000,00	Rp -		
	Belanja Tidak Langsung	Rp 2.532.693.000,00	Rp 2.532.693.000,00	Rp -		
00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	Rp 2.532.693.000,00	Rp 2.532.693.000,00	Rp -		
00.00.5.1.1.01.	Gaji & Tunjangan	Rp 2.293.356.000,00	Rp 2.293.356.000,00	Rp -		

KODE REKENING	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	TAHUN ANGGARAN 2011			BERTAMBAH / BERKURANG	PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp.		
		3	4	5		
1	2					
00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	Rp 231.800.000,00	Rp 231.800.000,00	Rp -	-	
00.00.5.1.1.05.	Biaya Insentif Peningkatan Rekrutasi Daerah	Rp 7.737.000,00	Rp 7.737.000,00	Rp -	-	
xx.xx.5.2.	Belanja Langsung	Rp 313.220.000,00	Rp 313.220.000,00	Rp -	-	
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp (2.691.173.000,00)	Rp (2.691.173.000,00)	Rp -	-	
1.20.1.20.17.	PEMERINTAH KECAMATAN MAPPEDEGENG					
4.	PENDAPATAN	Rp 23.700.000,00	Rp 23.700.000,00	Rp -	-	
6.	BELANJA	Rp 1.294.917.000,00	Rp 1.294.917.000,00	Rp -	-	
	Belanja Tidak Langsung	Rp 994.917.000,00	Rp 994.917.000,00	Rp -	-	
00.00.6.1.1.	Belanja Pegawai	Rp 994.917.000,00	Rp 994.917.000,00	Rp -	-	
00.00.5.1.1.01.	Gaji & Tunjangan	Rp 787.332.000,00	Rp 787.332.000,00	Rp -	-	
00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	Rp 206.400.000,00	Rp 206.400.000,00	Rp -	-	
00.00.5.1.1.05.	Biaya Insentif Peningkatan Rekrutasi Daerah	Rp 1.185.000,00	Rp 1.185.000,00	Rp -	-	
xx.xx.5.2.	Belanja Langsung	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp -	-	
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp (1.271.217.000,00)	Rp (1.271.217.000,00)	Rp -	-	
1.20.1.20.18.	PEMERINTAH KECAMATAN GONE-GONE					
4.	PENDAPATAN	Rp 108.148.000,00	Rp 108.148.000,00	Rp -	-	
6.	BELANJA	Rp 1.753.222.000,00	Rp 1.753.222.000,00	Rp -	-	
	Belanja Tidak Langsung	Rp 1.465.002.000,00	Rp 1.465.002.000,00	Rp -	-	
00.00.6.1.1.	Belanja Pegawai	Rp 1.465.002.000,00	Rp 1.465.002.000,00	Rp -	-	
00.00.5.1.1.01.	Gaji & Tunjangan	Rp 1.238.794.000,00	Rp 1.238.794.000,00	Rp -	-	
00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	Rp 220.800.000,00	Rp 220.800.000,00	Rp -	-	
00.00.5.1.1.05.	Biaya Insentif Peningkatan Rekrutasi Daerah	Rp 5.408.000,00	Rp 5.408.000,00	Rp -	-	
xx.xx.5.2.	Belanja Langsung	Rp 288.220.000,00	Rp 288.220.000,00	Rp -	-	
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp (1.645.072.000,00)	Rp (1.645.072.000,00)	Rp -	-	
1.20.1.20.19.	PEMERINTAH KECAMATAN SUKAMAJU					
4.	PENDAPATAN	Rp 98.984.000,00	Rp 98.984.000,00	Rp -	-	
6.	BELANJA	Rp 1.748.589.000,00	Rp 1.748.589.000,00	Rp -	-	
	Belanja Tidak Langsung	Rp 1.423.589.000,00	Rp 1.423.589.000,00	Rp -	-	
00.00.6.1.1.	Belanja Pegawai	Rp 1.423.589.000,00	Rp 1.423.589.000,00	Rp -	-	
00.00.5.1.1.01.	Gaji & Tunjangan	Rp 1.175.138.000,00	Rp 1.175.138.000,00	Rp -	-	
00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	Rp 243.600.000,00	Rp 243.600.000,00	Rp -	-	
00.00.5.1.1.05.	Biaya Insentif Peningkatan Rekrutasi Daerah	Rp 4.850.000,00	Rp 4.850.000,00	Rp -	-	
xx.xx.5.2.	Belanja Langsung	Rp 325.000.000,00	Rp 325.000.000,00	Rp -	-	
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp (1.651.605.000,00)	Rp (1.651.605.000,00)	Rp -	-	
1.20.1.20.20.	PEMERINTAH KABUPATEN KAPPUNJA					
4.	PENDAPATAN	Rp -	Rp -	Rp -	-	
6.	BELANJA	Rp 189.480.000,00	Rp 189.480.000,00	Rp -	-	
	Belanja Tidak Langsung	Rp 112.800.000,00	Rp 112.800.000,00	Rp -	-	
00.00.6.1.1.	Belanja Pegawai	Rp 112.800.000,00	Rp 112.800.000,00	Rp -	-	
00.00.5.1.1.01.	Gaji & Tunjangan	Rp -	Rp -	Rp -	-	

KODE REKENING	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	TAHUN ANGGARAN 2014			BERTAMBAH / BERKURANG Rp.	PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH			
		3	4	5	6	
00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	Rp 112.800.000,00	Rp 112.800.000,00	Rp -		
xx.xx.5.2	Belanja Langsung	Rp 76.680.000,00	Rp 76.680.000,00	Rp -		
		Rp (189.480.000,00)	Rp (189.480.000,00)	Rp -		
1.20.1.20.21.	PEMERINTAH KELURAHAN BONE					
		Rp -	Rp -	Rp -		
	PENDAPATAN					
		Rp 184.800.000,00	Rp 184.800.000,00	Rp -		
	BELANJA					
		Rp 109.000.000,00	Rp 109.000.000,00	Rp -		
	Belanja Tidak Langsung					
		Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -		
	Belanja Pegawai					
		Rp -	Rp -	Rp -		
	Gaji & Tunjangan					
		Rp 108.000.000,00	Rp 108.000.000,00	Rp -		
	Tambahan Penghasilan PNS					
		Rp 76.600.000,00	Rp 76.600.000,00	Rp -		
	Belanja Langsung					
		Rp (184.800.000,00)	Rp (184.800.000,00)	Rp -		
1.20.1.20.22.	PEMERINTAH KELURAHAN KASIMBONG					
		Rp -	Rp -	Rp -		
	PENDAPATAN					
		Rp 184.800.000,00	Rp 184.800.000,00	Rp -		
	BELANJA					
		Rp 109.200.000,00	Rp 109.200.000,00	Rp -		
	Belanja Tidak Langsung					
		Rp 109.200.000,00	Rp 109.200.000,00	Rp -		
	Belanja Pegawai					
		Rp -	Rp -	Rp -		
	Gaji & Tunjangan					
		Rp 109.200.000,00	Rp 109.200.000,00	Rp -		
	Tambahan Penghasilan PNS					
		Rp 75.600.000,00	Rp 75.600.000,00	Rp -		
	Belanja Langsung					
		Rp (184.800.000,00)	Rp (184.800.000,00)	Rp -		
1.20.1.20.23.	PEMERINTAH KELURAHAN BALASE					
		Rp -	Rp -	Rp -		
	PENDAPATAN					
		Rp 192.000.000,00	Rp 192.000.000,00	Rp -		
	BELANJA					
		Rp 116.400.000,00	Rp 116.400.000,00	Rp -		
	Belanja Tidak Langsung					
		Rp 116.400.000,00	Rp 116.400.000,00	Rp -		
	Belanja Pegawai					
		Rp -	Rp -	Rp -		
	Gaji & Tunjangan					
		Rp 116.400.000,00	Rp 116.400.000,00	Rp -		
	Tambahan Penghasilan PNS					
		Rp 75.600.000,00	Rp 75.600.000,00	Rp -		
	Belanja Langsung					
		Rp (192.000.000,00)	Rp (192.000.000,00)	Rp -		
1.20.1.20.24.	PEMERINTAH KELURAHAN MAROBO					
		Rp -	Rp -	Rp -		
	PENDAPATAN					
		Rp 180.200.000,00	Rp 180.200.000,00	Rp -		
	BELANJA					
		Rp 99.600.000,00	Rp 99.600.000,00	Rp -		
	Belanja Tidak Langsung					
		Rp 99.600.000,00	Rp 99.600.000,00	Rp -		
	Belanja Pegawai					
		Rp -	Rp -	Rp -		
	Gaji & Tunjangan					
		Rp 99.600.000,00	Rp 99.600.000,00	Rp -		
	Tambahan Penghasilan PNS					
		Rp 80.600.000,00	Rp 80.600.000,00	Rp -		

KODE REKENING	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	TAHUN ANGGARAN 2011			BERTAMBAH / BERKURANG	PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp.		
1	2	3	4	5	6	
		Rp (180.200.000,00)	Rp (180.200.000,00)	Rp -		
1. 20. 1.20.25.	PEMERINTAH KELURAHAN SALASSA					
	PENDAPATAN	Rp -	Rp -	Rp -		
	BELANJA	Rp 189.440.000,00	Rp 189.440.000,00	Rp -		
	Belanja Tidak Langsung	Rp 104.400.000,00	Rp 104.400.000,00	Rp -		
	00. 00. 5. 1. 1.	Rp 104.400.000,00	Rp 104.400.000,00	Rp -		
	00. 00. 5. 1. 1. 01.	Rp -	Rp -	Rp -		
	00. 00. 5. 1. 1. 02.	Rp 104.400.000,00	Rp 104.400.000,00	Rp -		
	xx. xx. 5. 2.	Rp 85.040.000,00	Rp 85.040.000,00	Rp -		
	Belanja Langsung	Rp -	Rp -	Rp -		
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp (189.440.000,00)	Rp (189.440.000,00)	Rp -		
1. 20. 1.20.26.	PEMERINTAH KELURAHAN BONE-BONE					
	PENDAPATAN	Rp -	Rp -	Rp -		
	BELANJA	Rp 195.800.000,00	Rp 195.800.000,00	Rp -		
	Belanja Tidak Langsung	Rp 104.400.000,00	Rp 104.400.000,00	Rp -		
	00. 00. 5. 1. 1.	Rp 104.400.000,00	Rp 104.400.000,00	Rp -		
	00. 00. 5. 1. 1. 01.	Rp -	Rp -	Rp -		
	00. 00. 5. 1. 1. 02.	Rp 104.400.000,00	Rp 104.400.000,00	Rp -		
	xx. xx. 5. 2.	Rp 91.400.000,00	Rp 91.400.000,00	Rp -		
	Belanja Langsung	Rp -	Rp -	Rp -		
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp (195.800.000,00)	Rp (195.800.000,00)	Rp -		
1. 20. 1.20.27.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					
	PENDAPATAN	Rp -	Rp -	Rp -		
	BELANJA	Rp 1.354.765.000,00	Rp 1.354.765.000,00	Rp -		
	Belanja Tidak Langsung	Rp 516.600.000,00	Rp 516.600.000,00	Rp -		
	00. 00. 5. 1. 1.	Rp 516.600.000,00	Rp 516.600.000,00	Rp -		
	00. 00. 5. 1. 1. 01.	Rp -	Rp -	Rp -		
	00. 00. 5. 1. 1. 02.	Rp 516.600.000,00	Rp 516.600.000,00	Rp -		
	xx. xx. 5. 2.	Rp 838.165.000,00	Rp 838.165.000,00	Rp -		
	Belanja Langsung	Rp -	Rp -	Rp -		
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp (1.354.765.000,00)	Rp (1.354.765.000,00)	Rp -		
1. 21. 1.21.01.	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN					
	PENDAPATAN	Rp -	Rp -	Rp -		
	BELANJA	Rp 9.348.987.000,00	Rp 9.348.987.000,00	Rp -		
	Belanja Tidak Langsung	Rp 7.222.342.000,00	Rp 7.222.342.000,00	Rp -		
	00. 00. 5. 1. 1.	Rp 7.222.342.000,00	Rp 7.222.342.000,00	Rp -		
	00. 00. 5. 1. 1. 01.	Rp 6.184.342.000,00	Rp 6.184.342.000,00	Rp -		
	00. 00. 5. 1. 1. 02.	Rp 1.039.000.000,00	Rp 1.039.000.000,00	Rp -		
	xx. xx. 5. 2.	Rp 2.128.645.000,00	Rp 2.128.645.000,00	Rp -		
	Belanja Langsung	Rp -	Rp -	Rp -		
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp (9.348.987.000,00)	Rp (9.348.987.000,00)	Rp -		

KODE REKENING	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	TAHUN ANGGARAN 2011			BERTAMBAH/ BERKURANG Rp.	PENJELASAN
		3 SEBELUM	4 SETELAH	5		
2. 02. 202.01.	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUJAN					
4.	PENDAPATAN	Rp 950.000.000,00	Rp 950.000.000,00	Rp -		
6.	BELANJA	Rp 8.288.718.000,00	Rp 8.288.718.000,00	Rp -		
00. 00. 5. 1.	Belanja Tidak Langsung	Rp 3.871.368.000,00	Rp 3.871.368.000,00	Rp -		
00. 00. 5. 1. 1.	Belanja Pegawai	Rp 3.871.368.000,00	Rp 3.871.368.000,00	Rp -		
00. 00. 5. 1. 1. 01.	Gaji & Tunjangan	Rp 3.065.868.000,00	Rp 3.065.868.000,00	Rp -		
00. 00. 5. 1. 1. 02.	Tambahan Penghasilan PNS	Rp 558.000.000,00	Rp 558.000.000,00	Rp -		
00. 00. 5. 1. 1. 05.	Biaya Insentif Peningkatan Rekrutasi Daerah	Rp 47.500.000,00	Rp 47.500.000,00	Rp -		
xx. xx. 5. 2.	Belanja Langsung	Rp 4.617.350.000,00	Rp 4.617.350.000,00	Rp -		
		Rp (7.338.718.000,00)	Rp (7.338.718.000,00)	Rp -		
2. 03. 203.01.	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI					
4.	PENDAPATAN	Rp -	Rp -	Rp -		
6.	BELANJA	Rp 3.712.124.000,00	Rp 3.712.124.000,00	Rp -		
00. 00. 5. 1.	Belanja Tidak Langsung	Rp 1.648.154.000,00	Rp 1.648.154.000,00	Rp -		
00. 00. 5. 1. 1.	Belanja Pegawai	Rp 1.648.154.000,00	Rp 1.648.154.000,00	Rp -		
00. 00. 5. 1. 1. 01.	Gaji & Tunjangan	Rp 1.258.154.000,00	Rp 1.258.154.000,00	Rp -		
00. 00. 5. 1. 1. 02.	Tambahan Penghasilan PNS	Rp 390.000.000,00	Rp 390.000.000,00	Rp -		
xx. xx. 5. 2.	Belanja Langsung	Rp 2.063.870.000,00	Rp 2.063.870.000,00	Rp -		
		Rp (3.712.124.000,00)	Rp (3.712.124.000,00)	Rp -		
5. 205.01.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN					
4.	PENDAPATAN	Rp 13.000.000,00	Rp 13.000.000,00	Rp -		
6.	BELANJA	Rp 8.867.330.000,00	Rp 8.867.330.000,00	Rp -		
00. 00. 5. 1.	Belanja Tidak Langsung	Rp 2.712.630.000,00	Rp 2.712.630.000,00	Rp -		
00. 00. 5. 1. 1.	Belanja Pegawai	Rp 2.112.630.000,00	Rp 2.112.630.000,00	Rp -		
00. 00. 5. 1. 1. 01.	Gaji & Tunjangan	Rp 1.666.300.000,00	Rp 1.666.300.000,00	Rp -		
00. 00. 5. 1. 1. 02.	Tambahan Penghasilan PNS	Rp 445.680.000,00	Rp 445.680.000,00	Rp -		
00. 00. 5. 1. 1. 05.	Biaya Insentif Peningkatan Rekrutasi Daerah	Rp 650.000,00	Rp 650.000,00	Rp -		
xx. xx. 5. 2.	Belanja Langsung	Rp 4.744.700.000,00	Rp 4.744.700.000,00	Rp -		
		Rp (8.844.330.000,00)	Rp (8.844.330.000,00)	Rp -		
	SILPA Tahun Anggaran Bekasman	Rp -	Rp -	Rp -		


 BUPATI,
 ARIFIN JUNAIDI